

## The effectiveness of utilizing output details in evaluation of government work plans 2023

### Efektivitas *tagging* rincian *output* (RO) dalam evaluasi capaian prioritas nasional (PN) matriks pembangunan rencana kerja pemerintah (RKP) 2023

**Rani Charisma Dewi**

Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri,  
Kementerian PUPR  
Email: rani.charisma@pu.go.id

#### ABSTRACT

The implementation of the 2023 RKP is based on Presidential Regulation Number 134 of 2022 concerning Updating the Government Work Plan for 2023; which contains 7 National Priorities (PN). Specifically in Appendix 2 of the 2023 RKP National Development Matrix, the Ministry of PUPR supports a number of 6 PNs. In this matrix, the PN is described with its targets, indicators, targets and funding allocation as well as the implementing agencies involved. Since 2020, the Ministry of National Development Planning/Bappenas and the Ministry of Finance have implemented the use of KRO/RO in the budgeting system. Output Detailed (OD) is a very specific real output that is produced which focuses on the characteristics of each unit and is directly related to the tasks and functions of the work unit in supporting the achievement of predetermined activity targets. The 2023 RKP evaluation was carried out primarily to measure the results of development performance achievements. Since the implementation of OD, evaluations have also been carried out using the RO approach. At the Ministry of PUPR, with a total of 37,850 packages, OD codification is carried out in a more generic manner. This makes the use of OD ineffective in evaluating the achievements of the 2023 PN RKP Development Matrix.

Keywords: government work plan; output detailed; evaluation; national priorities

#### ABSTRAK

Pelaksanaan RKP 2023 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023; yang memuat 7 Prioritas Nasional (PN). Khususnya pada Lampiran 2 RKP 2023 Matriks Pembangunan Nasional, Kementerian PUPR mendukung sejumlah 6 PN. Dalam matriks ini, PN dijabarkan dengan sasaran, indikator, target, dan alokasi pendanaannya serta instansi pelaksana yang terlibat. Sejak tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan memberlakukan penggunaan KRO/RO dalam sistem penganggaran. Rincian Output (RO) adalah keluaran (output) riil yang sangat spesifik yang dihasilkan yang berfokus pada karakteristik masing-masing unit serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Evaluasi RKP 2023 dilaksanakan terutama untuk mengukur hasil capaian kinerja pembangunan. Sejak diberlakukannya RO, evaluasi juga dilakukan menggunakan pendekatan RO. Di Kementerian PUPR, dengan jumlah paket dengan total 37.850 paket menjadikan kodifikasi RO dilakukan secara lebih generik. Hal ini menjadikan penggunaan RO menjadi tidak efektif dalam evaluasi capaian Matriks Pembangunan PN RKP 2023.

Kata kunci: rencana kerja pemerintah; rincian output; evaluasi; prioritas nasional

## 1. PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RAPBN dan Nota Keuangan. Untuk tahun 2023, pelaksanaan RKP didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

Sama seperti tahun sebelumnya, pemerintah menetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) dalam RKP 2023, yaitu PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan; PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; PN 6 Membangun Lingkungan Hidup: Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pada RKP 2023, terutama memuat tentang:

1. Narasi RKP Tahun 2023 yang terdiri atas VI (enam) Bab yakni Pendahuluan, Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional, Tema dan Sasaran Pembangunan, Penjabaran 7 (tujuh) Prioritas Nasional dan Pendanaan, Kaidah Pelaksanaan, serta Penutup.
2. Matriks Pembangunan yang memuat Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas (ProP) dengan penjabaran sasaran, indikator, target dan alokasi pendanaannya, serta instansi pelaksana.
3. Matriks Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP) yang memuat Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* pada Prioritas Nasional beserta alokasi pendanaannya.

Sejak tahun 2021, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan melakukan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (Pedoman, 2020). Redesain sistem diharapkan dapat memperbaiki kualitas anggaran serta implementasi money follow program, yang berarti bahwa program mencerminkan tugas fungsi K/L serta sasaran program (outcome) yang mencerminkan hasil kinerja program nasional. Implementasi proyek yang efektif sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan dari proyek pembangunan (Bank A. D., 2015). Dalam pelaksanaannya, dirumuskan nomenklatur output dalam Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) (KEAGAMAAN, 2022). KRO merupakan kumpulan RO yang disusun secara sistematis berdasarkan muatan keluaran (output) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu.

RO adalah output riil yang bersifat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja yang berfokus pada karakteristik masing-masing, isu dan/atau lokasi tertentu, dan terkait secara langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk menghitung jumlah anggaran untuk suatu output secara nasional. Tagging RO (Real Output) adalah suatu mekanisme pelabelan atau penandaan pada aktivitas atau output proyek yang sesuai dengan tujuan pembangunan dan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dalam konteks Matriks Pembangunan PN RKP 2023, penggunaan Tagging RO (output riil) menjadi penting karena berkontribusi pada efektivitas pengelolaan proyek dan pemantauan pencapaian target. Efektivitas merupakan hasil prestasi yang dicapai suatu organisasi (Maman Ukas, 2004). Berikut adalah beberapa poin yang mendukung pentingnya pembahasan efektivitas penggunaan Tagging RO dalam mendukung Matriks Pembangunan PN RKP 2023:

- **Pemantauan Pencapaian Target:** *Tagging RO* memungkinkan pemantauan yang lebih akurat terhadap pencapaian target pembangunan. Dengan memberikan label pada *output* yang dihasilkan, dapat dengan jelas dilihat sejauh mana proyek telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Matriks Pembangunan.
- **Evaluasi Kinerja Proyek:** *Tagging RO* memfasilitasi evaluasi kinerja proyek dengan memberikan penanda pada *output* yang dihasilkan. Hal ini membantu dalam menilai

sejauh mana proyek sesuai dengan rencana, apakah ada keterlambatan atau kendala tertentu, dan memungkinkan perbaikan yang cepat.

- **Akuntabilitas dan Transparansi:** Penggunaan *Tagging* RO meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan proyek. Dengan memiliki output yang jelas ditandai, para pemangku kepentingan dapat dengan mudah memahami kemajuan proyek dan mengidentifikasi potensi masalah atau hambatan.
- **Pengambilan Keputusan yang Informatif:** *Tagging* RO memperkaya informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Dengan mengetahui *output riil* yang dihasilkan, pembuat keputusan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
- **Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran:** Dengan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang *output* yang dihasilkan, penggunaan anggaran dapat diarahkan secara lebih efisien dan efektif. Ini membantu mencegah pemborosan sumber daya dan memastikan alokasi dana sesuai dengan pencapaian target.

Kementerian PUPR bertugas melaksanakan pembangunan infrastruktur yang mendukung ketercapaian prioritas nasional (Perpres 27/2020). Pelaksanaan pembangunan ini terutama dilaksanakan oleh Ditjen Sumber Daya Air/SDA (infrastruktur Sumber Daya Air), Ditjen Bina Marga/BM (infrastruktur jalan dan jembatan), Ditjen Cipta Karya/CK (infrastruktur permukiman), dan Ditjen Perumahan (infrastruktur perumahan). Pemantauan pelaksanaan RKP dilaksanakan berdasarkan Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Evaluasi adalah penilaian sistematis dan obyektif terhadap efektivitas dan dampak proyek. Hal ini membantu untuk menentukan apakah proyek mencapai tujuannya dan apakah proyek tersebut layak untuk dilanjutkan (Development Programme, 2017). Evaluasi dilakukan dalam rangka mengetahui perkembangan Program dan Kegiatan serta mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam pencapaian PN. Pengertian evaluasi yaitu "*evaluation is an activity which can contribute greatly to the understanding and improvement of policy development and implementation*". Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dihentikan kegiatannya (As'ari, Zulkarnaini, & Nasution, 2017).

Evaluasi RKP 2023 juga dilaksanakan untuk dukungan output terhadap pencapaian Matriks Pembangunan PN/PP/KP/ProP/indikator sebagai bahan untuk perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan, serta sebagai feedback perumusan tema dan sasaran pembangunan pada RKP tahun 2025.

Sejak redesain sistem penganggaran, evaluasi pelaksanaan anggaran, program prioritas, tematik nasional, termasuk RKP 2023 dilaksanakan dengan basis *tagging*/penandaan RO. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penggunaan *tagging* RO pada Ditjen SDA, Ditjen BM, Ditjen CK, dan Ditjen Perumahan khususnya dalam mendukung Matriks Pembangunan PN RKP 2023 merupakan hal yang penting untuk dikaji. Efektivitas yaitu pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektifitas tidak menyatakan tentang besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut (Kurniasawi, Kurniasari, & Marta, 2017). Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi

efektivitasnya (Maghfiroh, 2016). *Tagging* RO memiliki peran penting dalam memberikan gambaran yang jelas dan terintegrasi mengenai capaian pembangunan nasional. Efektivitas penggunaan *tagging* RO dapat memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan nasional, meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan nasional, dan meningkatkan akuntabilitas pembangunan nasional. Data yang dimanfaatkan untuk tulisan ini, adalah data *e-monitoring* Kementerian PUPR. Monitoring dan evaluasi merupakan alat penting untuk memastikan bahwa intervensi pembangunan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan (Bank, 2018).

Tahun 2023, dari tujuh tema PN, Kementerian PUPR mendukung/disebutkan terlibat dalam enam PN, yaitu PN-1, PN-2, PN-3, PN-5, PN-6, dan PN7. Selanjutnya dalam strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN, dilakukan melalui program prioritas (PP), yang selanjutnya dijabarkan pada Kegiatan Prioritas (KP) dan Proyek Prioritas (ProP) serta indikator yang diharapkan. Pada tulisan ini akan dibahas enam PN/PP/KP/ProP serta turunannya yang didukung oleh Kementerian PUPR sebagai berikut:

1. PN-1 dengan tema Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; selanjutnya dijabarkan dalam 3 PP, 6 KP, dan 7 ProP, dan 11 indikator. Pada PN ini, perincian indikator turunannya dilakukan dengan pendekatan *output* (Lampiran-1).
2. Untuk PN-2 dengan tema Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pada PN ini perincian indikator turunan dilakukan dengan pendekatan wilayah pembangunan yaitu Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa-Bali, Wilayah Nusa Tenggara, Wilayah Kalimantan, Wilayah Sulawesi, Wilayah Maluku, dan Wilayah Papua. Selanjutnya dalam PN ini dijabarkan dalam 7 PP berdasarkan pembagian wilayah tersebut, 19 KP, dan 55 ProP, dan 84 indikator.
3. PN-3 dengan tema Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; dirincikan dalam 4 PP, 4 KP, dan 5 ProP, dan 17 indikator. Pada PN ini perincian indikator turunan dilakukan dengan pendekatan *output* dan *outcome*.
4. PN-5 dengan tema Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; merupakan PN utama yang didukung oleh Kementerian PUPR. pada PN ini dirincikan dalam 3 PP, 9 KP, dan 24 ProP, dengan jumlah total 48 indikator. Perincian indikator ini dilakukan dengan pendekatan *output*.
5. PN-6 dengan tema Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; diturunkan dalam 3 PP, 4 KP, 8 ProP, dan 19 indikator yang disebutkan dalam pendekatan *output* dan *outcome*.
6. PN-7 dengan tema Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dirincikan dalam 1 PP, 1 KP, 1 ProP, dan 4 indikator dengan pendekatan *output*.

Pada tahun 2023, Kementerian PUPR ditugaskan untuk melakukan belanja infrastruktur senilai total Rp. 163 Triliun (status 7 Oktober 2023) yang terbagi dalam total sejumlah 37.850 paket kegiatan. Untuk mengelolanya, secara penganggaran dan evaluasi, Kementerian PUPR memiliki aplikasi *e-monitoring* yang juga dimanfaatkan dalam melakukan evaluasi dukungan Kementerian PUPR dalam pencapaian PN matriks pembangunan RKP 2023. Meskipun Kementerian PUPR telah memiliki aplikasi *e-monitoring*, permasalahan mungkin muncul terkait efektivitas dan kehandalan sistem tersebut. Kesiapan infrastruktur teknologi, kualitas data yang dimasukkan, dan pemahaman pengguna terhadap aplikasi dapat memengaruhi kelancaran evaluasi. Secara aplikatif, pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan melakukan *tagging*/penandaan pada masing-masing indikator PN yang didukung oleh Kementerian PUPR. Sebelum Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran pada tahun 2021, pelaksanaan *tagging*/penandaan indikator dilakukan pada level paket kegiatan. Dan sejak redesain,

pelaksanaan penandaan juga dilaksanakan pada level RO. Perubahan dalam pelaksanaan penandaan indikator dari level paket kegiatan menjadi level *Real Output* (RO) setelah redesain sistem pada tahun 2021 mungkin menimbulkan tantangan. Keterampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk melakukan *tagging* pada level RO mungkin berbeda dengan level paket kegiatan, sehingga pihak terkait mungkin memerlukan pelatihan dan pemahaman yang lebih mendalam untuk memastikan konsistensi dan keakuratan *tagging* pada tingkat yang lebih tinggi ini.

Dalam penyusunan RO, empat direktorat jenderal terkait melaksanakan kegiatan dengan karakteristik yang berbeda, hal ini juga menjadikan pendekatan yang berbeda dalam penyusunan KRO/RO. Pada Ditjen SDA, *output* yang sama dikelompokkan dalam satu KRO. Untuk turunannya yaitu RO, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang telah cukup spesifik, bernilai anggaran cukup besar, sudah dapat diidentifikasi lokasi, kegiatan yang menggunakan dana SBSN, atau kegiatan MYC disusun dalam RO tersendiri atau RO spesifik. Sehingga kegiatan yang memiliki *output* yang sama pada satu lokasi dikelompokkan dalam satu RO. Selain RO spesifik, Ditjen SDA juga menggunakan RO generik untuk kegiatan-kegiatan baru atau direktif baru yang belum dapat diidentifikasi sejak awal *Trilateral Meeting*. Pada level dibawahnya yaitu paket pekerjaan, berisi rincian *sub output* yang mendukung *output* yang sama. Sebagai contoh kegiatan supervisi dan kegiatan fisik dengan *output* yang sama, dibuat menjadi paket pekerjaan yang berbeda dalam satu RO yang sama. Sehingga pada tahun 2023, Ditjen SDA terdapat sejumlah total 47 KRO, 309 RO, 14.556 paket pekerjaan.

Pada Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Perumahan penyusunan RO dilakukan dengan lebih general dengan pendekatan isu atau *output* yang sama. KRO merupakan *output* yang lebih umum seperti pada Ditjen Bina Marga adalah Pembangunan atau Operasi/Jalan atau Jembatan. KRO pada Ditjen Cipta Karya seperti Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah; Prasarana Pendidikan Tinggi, dll. Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan menggunakan KRO yang sama yaitu Prasarana Bidang Permukiman dan Perumahan. KRO di sini menjadi satu hal yang setara dengan sasaran program dalam Renstra Kementerian PUPR.

Tiga ditjen ini menggunakan RO generik yang disusun berdasar *output* yang sama dengan lokasi tersebar seluruh Indonesia. Pemisahan/penambahan RO dimungkinkan jika terdapat isu/tematik khusus/baru, seperti contohnya KSPN, Trans Papua, IKN, dll. Lebih detail pekerjaan dalam lokasi tertentu dibagi dalam paket kegiatan. Secara total, tahun 2023, Ditjen Bina Marga memiliki 16 KRO, 98 RO, dan 12.038 paket pekerjaan. Ditjen Cipta Karya memiliki 31 KRO, 97 RO, dan 7.271 paket pekerjaan. Ditjen Perumahan 10 KRO, 58 RO, dan 2.197 paket pekerjaan.

**Tabel 1: Jumlah KRO, RO, dan Paket Pekerjaan pada Ditjen SDA, BM, CK, Perumahan**

No.	Unit Organisasi	Jumlah		
		KRO	RO	Paket
1	Ditjen Sumber Daya Air	47	309	14.558
2	Ditjen Bina Marga	16	98	12.038
3	Ditjen Cipta Karya	31	97	7.271
4	Ditjen Perumahan	10	58	2.197
		104	562	36.064

*Sumber: E-monitoring PUPR, status 10 Oktober 2023.*

Perbedaan pendekatan baik dalam penyusunan rincian indikator RKP 2023 dan penyusunan RO menjadikan kendala atau permasalahan bahwa pemanfaatan penandaan/*tagging* RO tidak efektif untuk menghitung dukungan Kementerian PUPR dalam pencapaian target PN karena beberapa faktor yaitu:

- **Perbedaan pendekatan dalam penyusunan rincian indikator RKP 2023 dan penyusunan RO**  
Pada RKP 2023, indikator PN dirincikan berdasarkan *output* dan *outcome*, sedangkan pada penyusunan RO, Direktorat Jenderal (Ditjen) SDA menggunakan pendekatan *output*, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Perumahan menggunakan pendekatan isu atau *output* yang sama. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara indikator PN yang diharapkan dengan *output* yang dihasilkan oleh kegiatan Kementerian PUPR.
- **Keragaman nomenklatur**  
Nomenklatur program dan kegiatan pembangunan nasional di Kementerian PUPR belum seragam dengan nomenklatur program dan kegiatan pembangunan nasional secara keseluruhan. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam melakukan *tagging* RO.
- **Kompleksitas**  
Kementerian PUPR memiliki tugas dan fungsi yang luas, meliputi pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, irigasi, permukiman, perumahan, dan pekerjaan umum lainnya. *Tagging* RO yang dilakukan oleh Kementerian PUPR belum mencakup seluruh aspek tugas dan fungsi tersebut.
- **Ketersediaan data**  
Data yang diperlukan untuk melakukan *tagging* RO belum tersedia secara lengkap dan akurat. Hal ini dikarenakan data tersebut tersebar di berbagai instansi dan lembaga pemerintah, sehingga memerlukan koordinasi yang kuat untuk mengumpulkan dan mengintegrasikannya.
- **Kerjasama antar-instansi**  
Penerapan *tagging* RO membutuhkan kerjasama antar-instansi pemerintah, termasuk Kementerian PUPR. Namun, kerjasama antar-instansi pemerintah masih belum optimal, sehingga dapat menghambat proses *tagging* RO.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah (Moleong, 2014). Metode penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai secara langsung hasil efektivitas *tagging* RO dalam evaluasi capaian PN Matriks Pembangunan RKP 2023 (Adlini dkk., 2022). Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif, analisis dilakukan menggunakan data pada *e-monitoring* dengan status Oktober 2023.

Kementerian PUPR mempunyai aplikasi pemrograman dan penganggaran termasuk untuk juga dimanfaatkan untuk evaluasi penganggaran, yaitu *e-monitoring*. Dalam *e-monitoring* disusun menu terkait Matriks Pembangunan RKP 2023. Untuk selanjutnya, *tagging* paket pekerjaan dilakukan pada level indikator ProP untuk seluruh PN dilakukan oleh masing-masing unit penanggungjawab. Dalam pelaksanaan *tagging*, memungkinkan ada satu paket pekerjaan mendukung beberapa indikator ProP yang berbeda.

Selanjutnya berdasarkan *tagging* paket pekerjaan, dilakukan *tagging* RO menggunakan sistem *e-monitoring*. Sama dengan *tagging* paket pekerjaan, *tagging* RO dilakukan pada level indikator ProP. RO paket terkait, ditarik sebagai *tagging* terhadap PN dan dijumlahkan sebagai total dukungan terhadap PN. Dalam hal ini, paket-paket berbeda yang berinduk pada RO yang sama akan ditarik/dibaca oleh sistem sebagai satu RO mendukung indikator ProP. Pada *tagging*/penandaan RO, tidak ada RO yang sama dalam satu indikator ProP, namun memungkinkan adanya RO yang sama dalam PN yang sama.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hasil Tagging Paket dan RO

Setelah dilakukan *tagging* paket pekerjaan oleh unit organisasi penanggung jawab dan *tagging* RO berdasarkan sistem *e-monitoring*, selanjutnya dilakukan perbandingan total anggaran *tagging* paket dan *tagging* RO. Secara total Kementerian PUPR, perbandingan rekapitulasi *tagging* dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 1: Perbandingan Rekapitulasi Tagging RO dan Tagging Paket Pekerjaan pada PN RKP 2023**

No.	PN	Alokasi Tercantum pada RKP 2023 (seluruh KL) (Rp. Ribu)	Tagging RO 2023			Tagging Paket TA 2023			Persentase tagging paket dibandingkan tagging RO 10-9/6
			RO	Paket	Pagu	RO	Paket	Pagu	
					(Rp. Ribu)			(Rp. Ribu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-9/6
1	PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	21.297.714.000	138	1.831	43.839.185.880	138	652	33.777.813.986	77,05%
2	PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	78.809.056.000	378	112.147	410.509.384.483	378	1.382	15.346.457.235	3,74%
3	PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	117.095.481.000	7	967	8.246.644.624	7	352	5.594.329.938	67,84%
4	PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	70.264.408.000	243	10.526	144.636.427.325	243	2.358	73.134.684.169	50,56%
5	PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	5.759.944.000	68	9.092	38.382.235.674	68	587	7.565.410.133	19,71%
6	PN 7 Memperkuat Stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	453.586.000	4	89	3.184.195.823	4	42	1.456.331.842	45,74%
		293.680.189.000	839	134.652	648.798.073.809	838	5.373	136.875.027.303	21,10%

**Sumber:** Emonitoring PUPR, status 10 Oktober 2023.

*Tagging*/penandaan paket pekerjaan pada sistem *e-monitoring* dilaksanakan oleh penanggungjawab program/kegiatan, maka diasumsikan bahwa *tagging* paket pekerjaan memiliki tingkat akurasi tinggi mendekati 100% dalam mendukung PN. Akurasi adalah ukuran kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya atau nilai target; atau persentase dari data yang diprediksi secara benar (Han dkk., 2012). Pada tulisan ini, efektivitas *tagging* RO didasarkan pada akurasi yang dilihat dari perbandingan nilai *tagging* paket pekerjaan terhadap *tagging* RO. Pada tulisan ini akan menggunakan toleransi mengacu pada total kesalahan yang diperbolehkan dalam suatu perhitungan. Nilai akurasi akan masuk pada toleransi mendekati kebenaran jika senilai >95%.

Berdasar *tagging* paket, dapat dilihat bahwa Kementerian PUPR mendukung total Rp. 138,87 Triliun (83% alokasi anggaran Kementerian PUPR 2023). Pada *tagging* RO, tidak memungkinkan terdapat *double tagging* RO dalam level indikator ProP namun memungkinkan dalam level PN. Sehingga total jumlah dukungan Kementerian PUPR pada RKP 2023 sejumlah Rp. 648,8 Triliun (atau 4 kali total alokasi anggaran Kementerian PUPR). Dari perbandingan rekapitulasi *Tagging* RO dan *Tagging* Paket 2023 (Table 2), terdapat selisih yang cukup besar pada jumlah alokasi anggaran.

**Tabel 2: Tagging RO dan Paket untuk PN RKP 2023 pada Ditjen Sumber Daya Air**

No.	PN	Alokasi Tercantum pada RKP 2023 (seluruh KL) (Rp. Ribu)	Tagging RO 2023			Tagging Paket TA 2023			Persentase tagging paket dibandingkan tagging RO 10=9/6
			RO	Paket	Pagu	RO	Paket	Pagu	
					(Rp. Ribu)			(Rp. Ribu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/6
1	PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	21.297.714.000	137	1.481	37.217.527.839	137	649	33.731.288.038	90,63%
2	PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	78.809.056.000	114	27.057	41.179.554.580	114	352	3.632.323.396	8,82%
3	PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	117.095.481.000							
4	PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	70.264.408.000	169	2.065	42.264.589.808	169	842	31.609.722.250	74,79%
5	PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	5.759.944.000	42	856	6.738.578.330	42	206	4.536.253.255	67,32%
6	PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	453.586.000							
		293.680.189.000	463	31.459	127.400.250.557	462	2.049	73.509.586.939	57,70%

Sumber: Emonitoring PUPR, status 10 Oktober 2023.

**Tabel 3: Tagging RO dan Paket untuk PN RKP 2023 pada Ditjen Bina Marga**

No.	PN	Alokasi Tercantum pada RKP 2023 (seluruh KL) (Rp. Ribu)	Tagging RO 2023			Tagging Paket TA 2023			Persentase tagging paket dibandingkan tagging RO 10=9/6
			RO	Paket	Pagu	RO	Paket	Pagu	
					(Rp. Ribu)			(Rp. Ribu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/6
1	PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	21.297.714.000	1	350	6.621.658.041	1	3	46.525.948	0,70%
2	PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	78.809.056.000	122	50.343	276.001.192.508	122	471	3.280.693.027	1,19%
3	PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	117.095.481.000	0	0	0	0	0	0	
4	PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	70.264.408.000	41	4.961	83.234.199.561	41	282	26.384.794.985	31,70%
5	PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	5.759.944.000	11	7.022	26.485.050.895	11	109	845.699.199	3,19%
6	PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	453.586.000	3	65	2.849.847.531	3	18	1.121.983.550	
		293.680.189.000	178	62.741	395.191.948.536	178	883	31.679.696.709	8,02%

Sumber: Emonitoring PUPR, status 10 Oktober 2023.

**Tabel 4: Tagging RO dan Paket untuk PN RKP 2023 pada Ditjen Cipta Karya**

No.	PN	Alokasi Tercantum pada RKP 2023 (seluruh KL) (Rp. Ribu)	Tagging RO 2023			Tagging Paket TA 2023			Persentase tagging paket dibandingkan tagging RO 10=9/6
			RO	Paket	Pagu	RO	Paket	Pagu	
					(Rp. Ribu)			(Rp. Ribu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/6
1	PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	21.297.714.000							
2	PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	78.809.056.000	84	23.880	54.222.430.180	84	418	6.674.353.092	12,31%
3	PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	117.095.481.000	3	254	3.777.525.885	3	100	2.496.464.490	66,09%
4	PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	70.264.408.000	23	2.642	9.725.235.978	23	480	5.814.148.233	59,78%
5	PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	5.759.944.000	13	1.079	4.059.384.787	13	261	1.633.153.533	40,23%
6	PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	453.586.000	1	24	334.348.292	1	24	334.348.292	100,00%
		293.680.189.000	124	27.879	72.118.925.122	124	1.283	16.952.467.640	23,51%

Sumber: Emonitoring PUPR, status 10 Oktober 2023.

**Tabel 5: Tagging RO dan Paket untuk PN RKP 2023 pada Ditjen Perumahan**

No.	PN	Alokasi Tercantum pada RKP 2023 (Total seluruh KL) (Rp. Ribu)	Tagging RO 2023			Tagging Paket TA 2023			Persentase tagging paket dibandingkan tagging RO 10=9/6	
			RO	Paket	Pagu	RO	Paket	Pagu		
					(Rp. Ribu)			(Rp. Ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/6	
1	PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	21.297.714.000								
2	PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	78.809.056.000	58	10.815	39.069.612.690	58	141	1.756.270.996	4,50%	
3	PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	117.095.481.000	4	714	4.469.118.739	4	252	3.097.865.448		
4	PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	70.264.408.000	10	854	9.409.187.403	10	754	9.325.494.941	99,11%	
5	PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	5.759.944.000	2	125	1.096.078.509	2	11	550.304.146	50,21%	
6	PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	453.586.000								
		293.680.189.000	74	12.508	54.043.997.341	74	1.158	14.729.935.531	27,26%	

Sumber: Emonitoring PUPR, status 10 Oktober 2023.

## 2. Analisis Hasil dan Pilihan Kebijakan

Untuk melihat efektivitas pemanfaatan *tagging* RO dalam evaluasi capaian PN, maka dilakukan *tagging* RO pada indikator ProP untuk seluruh PN. Sebagai perbandingan, dilakukan juga *tagging* paket pekerjaan pada indikator ProP untuk seluruh PN.

Dari pembahasan diatas, secara umum pendekatan dalam penyusunan indikator RKP 2023 dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan kewilayahan (PN-2) dan pendekatan *output* untuk PN lainnya (PN 1, 3, 5, 6, 7). Secara analisis akan dilakukan pada rekap seluruh unit organisasi.

Dari rekap *tagging* pada Table-3 sampai dengan Table-6 diatas, tidak semua unit organisasi mendukung seluruh PN. Namun dapat dilihat bahwa seluruh unit organisasi mendukung PN-2 yang disusun dengan pendekatan kewilayahan, dan mendukung PN lainnya yang disusun berdasarkan *output*.

### Tagging RO untuk PN-2 dengan Basis Kewilayahan

Khususnya PN-2 yang dijabarkan dalam PP/KP/ProP dengan pendekatan kewilayahan, menjadi tantangan dalam pemanfaatan RO sebagai evaluasi. Analisis dilakukan terpisah antara PN-2 dan PN lainnya. Pada rekap seluruh Kementerian PUPR, pada PN-2 didapatkan akurasi 3,74% dengan *tagging* paket pekerjaan sejumlah 1.382 paket senilai Rp. 15,34 Triliun, pada saat dilakukan *tagging* RO menjadi sejumlah 112.147 paket senilai Rp. 410 Triliun. Nilai ini sangat jauh lebih rendah dibandingkan akurasi untuk PN-lainnya (Table-1).

Jika dilihat lebih detail untuk rekap masing-masing ditjen, akurasi *tagging* pada PN-2 mendapatkan hasil paling rendah dibandingkan untuk dukungan pada PN lainnya, kecuali pada Ditjen BM. Pada Ditjen SDA, akurasi *tagging* PN-2 dengan hasil 8,82% atau jauh lebih rendah dibandingkan akurasi pada PN lainnya. Pada PN-2 dengan jumlah *tagging* paket 352 senilai Rp. 3,6 Triliun, pada saat dilakukan *tagging* RO menjadi 27.057 paket dengan nilai Rp. 41,17 Triliun.

Ditjen BM, dengan akurasi 1,19% dari sejumlah *tagging* paket pekerjaan sejumlah 471 paket senilai Rp. 3,2 Triliun menjadi 50.343 paket senilai Rp.276 Triliun pada *tagging* RO. Jika dilihat dari akurasi jumlah paket juga cukup rendah sebesar 0,93%.

Ditjen CK, dengan akurasi 12,31% dari sejumlah *tagging* paket pekerjaan sejumlah 418 paket senilai Rp. 6,67 Triliun menjadi 23.880 paket senilai Rp.54,2 Triliun pada *tagging* RO.

Ditjen Perumahan, dengan akurasi 4,5% dari sejumlah *tagging* paket pekerjaan sejumlah 141 paket senilai Rp. 1,75 Triliun menjadi 10.815 paket senilai Rp.39 Triliun pada *tagging* RO.

### ***Tagging* RO untuk PN lainnya dengan Basis *Output* dan *Outcome***

Secara total, diantara seluruh ditjen, Ditjen BM memiliki akurasi yang paling rendah yaitu sebesar 8,02%, dengan rentang 0,7% pada PN-1 hingga 31,7% pada PN-5. Hal ini melihat pada penggunaan kodifikasi RO yang sangat generik untuk seluruh kegiatan. Adapun terdapat tematik, kodifikasi RO pada Ditjen BM mencakup pada lokasi yang cukup luas (contoh RO Trans Papua).

Untuk Ditjen CK dan Perumahan, terdapat satu PN dengan tingkat toleransi yang sangat tinggi yaitu untuk dan PN-7 Ditjen Cipta Karya (100%) pada PN-5 pada Ditjen Perumahan (99,11%).

Jika melihat lebih detail pada PN-7 Ditjen CK mendukung indikator jumlah pos pamtas, posal, pos pol subsektor, dan PLBN yang dibangun dengan kegiatan pengembangan/Pembangunan Sarana Prasarana Bangunan (PLBN) termasuk kegiatan supervisi, perencanaan teknis, pembebasan tanah, meubeleir, dll di beberapa lokasi PLBN (Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, NTT). Pada seluruh kegiatan di perbatasan (PLBN dan pendukungnya), Ditjen CK menggunakan kodifikasi RO Spesifik yaitu 001 Penataan Bangunan Kawasan Pos Lintas Batas Negara. Sehingga pada saat *tagging* RO didapatkan akurasi sebesar 100% sama dengan *tagging* paket pekerjaan.

Untuk PN-5 Ditjen Perumahan mendukung tiga indikator:

1. Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui fasilitasi pemerintah  
Pada indikator ini, Ditjen Perumahan mendukung melalui seluruh kegiatan terkait rumah susun, rumah khusus, rumah bantuan pasca bencana termasuk kegiatan fisik dan non fisiknya (meubelair, supervisi, ded, dll, manajemen konstruksi, dll). seluruh kegiatan pada *output* tersebut dimasukkan pada *tagging* paket pekerjaan. Pada kegiatan ini masuk pada beberapa RO seperti [003] Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI, [012] Bantuan Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (RITTA), [002] Rumah Khusus
2. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas  
Pada indikator ini, Ditjen Perumahan mendukung dan melakukan *tagging* paket pekerjaan untuk seluruh kegiatan terkait peningkatan kualitas rumah swadaya di seluruh Indonesia termasuk kegiatan fisik maupun pembinaan dan pendampingan. Seluruh kegiatan tersebut dalam kodifikasi RO yang sama yaitu [008] Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
3. Jumlah rumah yang dilayani bantuan PSU pada perumahan termasuk PSU kawasan skala besar  
Pada indikator ini, Ditjen Perumahan mendukung dan melakukan *tagging* paket pekerjaan untuk seluruh kegiatan terkait pembangunan PSU Perumahan MBR dengan lokasi tersebar seluruh Indonesia termasuk kegiatan fisik maupun non fisik (DED, supervisi, pendampingan, pengawasan/pengendalian). Seluruh kegiatan tersebut dalam kodifikasi RO yang sama yaitu [001] Bantuan PSU Perumahan.

Akurasi pada dukungan PN-5 pada Ditjen Perumahan ini sebesar 99,11% (anggaran *tagging* paket Rp. 9,32 triliun dan *tagging* RO Rp. 9,4 Triliun). Akurasi ini didapatkan dari selisih sebesar 100 paket yang masuk dalam *tagging*, terdapat paket non fisik yang belum masuk dalam *tagging* paket.

### **Rekap *Tagging* seluruh PN Kementerian PUPR**

Pada Table-2 rekap seluruh PN pada Kementerian PUPR, dengan rata-rata hasil akurasi sebesar 21,1% atau jika melihat masing-masing PN dengan rentang nilai

akurasi berkisar antara 3,74% pada PN-2 hingga maksimal 77,05% pada PN-1. Penggunaan RO menjadikan dukungan Kementerian PUPR pada RKP menjadi sangat besar 3,9 kali lipat (Rp. 163 Triliun) diatas pagu Kementerian PUPR (Rp. 163 Triliun).

#### 4. KESIMPULAN

1. Secara umum, *tagging* RO tidak efektif digunakan untuk evaluasi capaian PN RKP 2023, baik pada PN-2 (pendekatan berbasis kewilayahan) maupun PN lainnya (pendekatan berbasis *output* dan *outcome*).
2. Evaluasi capaian PN RKP efektif jika seluruh paket pekerjaan dalam RO menjadi dukungan dalam indikator ProP.
3. Untuk tahun 2023, *tagging* paket pekerjaan lebih tepat digunakan dalam evaluasi capaian PN, karena paket pekerjaan telah spesifik per-*output* pada lokasi tertentu sehingga dapat digunakan untuk dilakukan *tagging* PN/PP/KP/ProP/Indikator yang disusun dengan pendekatan yang berbeda.
4. Jumlah paket pekerjaan yang cukup banyak membutuhkan waktu yang lebih lama dan memungkinkan terjadinya kesalahan dalam penandaan/*tagging*.

#### 5. REKOMENDASI

1. Penyampaian evaluasi capaian PN RKP 2023 akan disampaikan berdasarkan *tagging*/penandaan pada level paket pekerjaan, bukan berdasarkan *tagging*/penandaan level RO.
2. Perlu penyeragaman dalam penyusunan PN/PP/KP/ProP/indikator dalam dokumen perencanaan/penganggaran (RKP). Jika tetap menggunakan evaluasi berdasarkan RO, maka *cascading* dalam PN/PP/KP/ProP/indikator tepat pada RO spesifik dengan pendekatan *output*.
3. Perlu dilakukan review kembali terhadap RO baik kodifikasi maupun pemanfaatannya dalam evaluasi capaian PN RKP. Saat ini penganggaran tahun 2024 telah selesai dilakukan. Penyusunan kodifikasi RO tahun 2025 lebih banyak RO Spesifik berdasarkan *output*/isu dan lokasi merujuk pada Peraturan Dirjen Anggaran.
4. Perlu terus dilakukan penyempurnaan sistem *e-monitoring* untuk *filtering* untuk mempercepat dan mengurangi *human error*. Integrasi dengan sistem pelaporan capaian PN-RKP juga perlu dikembangkan hingga level *tagging* paket pekerjaan

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi pada Kementerian PUPR terutama Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan yang telah berkontribusi besar dalam penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Jurnal

- As'ari, H., Zulkarnaini, & Nasution, M. S. "Evaluasi Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Dalam Upaya Penguatan Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, (2017), Vol 14, No 2, Januari, 109-123. DOI: <http://dx.doi.org/10.46730/jiana.v15i1.3869>
- Maghfiroh, N. A. "Efektivitas Sistem Informasi Pelaporan Monitoring Dan Evaluasi (E-Controlling) Pada Bagian Evaluasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bontang", *Jurnal Paradigma*, (2016), Vol 5, No 1, 34-44. DOI: <http://dx.doi.org/10.30872/jp.v5i1.426>
- Kurniasari Dewi, Dedeh Kurniasari, M. Sandi Marta, "Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran Di Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, (2017), Vol 2, No 2, Oktober, 71-88. DOI: <https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i2.1446>

**Buku**

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.
- Asian Development Bank. (2015). *Handbook on Project Implementation*. Manila: Asian Development Bank.
- Han, J., Kamber, M, & Pei, J. (2012). *Data Mining: Concept and Techniques, Third Edition*. Waltham: Morgan Kaufmann Publishers.
- Keagamaan, B. P. (2022). *Laporan Kegiatan Perencanaan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Balai Diklat Keagamaan Semarang Tahun Anggaran 2022*.
- Maman Ukas. (2004). *Manajemen, Konsep, Prinsip, Dan Aplikasi*. Bandung: Agnini.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- United Nations Development Programme. 2017. *Project Design Manual: A Step-by-Step Tool to Support the Development of Cooperatives and Other Forms of Self-Help Organizations*. New York: UNDP
- World Bank. 2018. *Monitoring and Evaluation (M&E) Framework*. Washington, DC: World Bank.

**Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
- Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2020, Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Surat Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas No. S-12/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran